

Produk Domestik Regional Bruto KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menurut Pengeluaran

2010-2015



Produk Domestik Regional Bruto KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menurut Pengeluaran

2010-2015



<http://bengkuluutara.yab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN BENGKULU UTARA
MENURUT PENGELUARAN 2010 - 2015**

ISBN : 978-602-6881-28-1
Nomor Publikasi : 170306.16.41
Katalog BPS : 9302002.1703

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 63 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara

<http://bengkuluutarakab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN BENGKULU UTARA
MENURUT PENGELUARAN 2010 - 2015**

Anggota Tim Penyusun:

Editor : Ir. Sriwijana Teguh Ananto, M.Si

Penulis : FURKAN,SE

Pengolah data dan grafik : FURKAN,SE

Pembuat gambar cover : Popy Permawani, S.ST

<http://bengkuluutarakab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pengeluaran 2010-2015** merupakan terbitan seri pertama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Publikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen akan keragaman data statistik pada level kabupaten dengan menerapkan *System of National Accounts (SNA) 2008* berdasarkan Tahun Dasar 2010 (2010 = 100).

Publikasi ini memuat tabel-tabel Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Selain menyajikan tabel yang berisi nilai nominal, publikasi ini juga menyajikan angka-angka turunan PDRB lainnya seperti distribusi, indeks perkembangan, pertumbuhan komponen pengeluaran, dan laju indeks implisit. Penyajian PDRB menurut pengeluaran dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara yang dilihat dari sisi pengeluaran akhir masyarakat atau pengeluaran dari setiap aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian publikasi ini. Saran dan kritik dari para pengguna kami harapkan demi penyempurnaan publikasi berikutnya. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para konsumen data.

Arga Makmur, Oktober 2016

BPS Kabupaten Bengkulu Utara
Kepala,

Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT)	11
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	13
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5. Perubahan Inventori (PI)	18
2.6. Ekspor Impor	21
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2010-2015	23
3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran	23
3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	30
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga	31
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	35

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	36
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	38
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	40
3.7. Perkembangan Ekspor dan Impor	41
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN	44
4.1. PDRB Nominal	44
4.2. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	45
4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	46
4.4. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumahtangga Terhadap Ekspor	47
4.5. Perbandingan PDRB Terhadap Impor	48
4.6. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	48
4.7. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	50
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN TABEL	53

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)	25
Gambar 3.2 Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah)	26
Gambar 3.3 Perbandingan Pertumbuhan PDRB adh Konstan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2015 (Persen)	29

DAFTAR TABEL

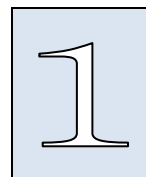
		Hal
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah)	24
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah)	25
Tabel 3.3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015 (Persen)	27
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2015 (Persen)	28
Tabel 3.5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015	30
Tabel 3.6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015	32
Tabel 3.7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015 (Persen)	33
Tabel 3.8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2011 – 2015 (Persen)	34
Tabel 3.9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015 (Persen)	35
Tabel 3.10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015	36
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015	37
Tabel 3.12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2010 – 2015	39

Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015	40
Tabel 3.14	Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015	42
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015	44
Tabel 4.2	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2010-2015	45
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015	46
Tabel 4.4	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015	44
Tabel 4.5	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015	48
Tabel 4.6	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015	49
Tabel 4.7	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)	54
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)	55
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)	56
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)	57
Tabel 5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2015 (Persen)	58
Tabel 6. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2015 (Persen)	59
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)	60
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)	61
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015	62
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)	63

<http://bengkuluutarakab.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka

perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- **Konsep dan Cakupan**
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- **Metodologi**

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5. Perubahan Inventori
4. Perubahan Inventori	6. Ekspor
5. Ekspor	7. Impor
6. Impor	

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;

4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di

kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output –

Penjualan barang dan jasa +

Social transfer in kind purchased market production +

Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan, tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan

yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas

dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang
x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x
Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<http://bengkuluutarakab.bps.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2010-2015

3

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB dietimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun 2010 = 100, untuk menggantikan tahun dasar lama, 2000 = 100. Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan system of National Account (SNA) yang baru, SNA 2008.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2015, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Bengkulu Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan tanda peningkatan yang terlihat dari nilai agregat PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan nilai agregat PDRB merupakan salah satu ukuran dalam pencapaian program pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan pada setiap sektor ekonomi. Bagi pemerintah daerah, indikator ini sangat

dibutuhkan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta bermanfaat untuk menentukan arah pembangunan pada masa yang akan datang.

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)

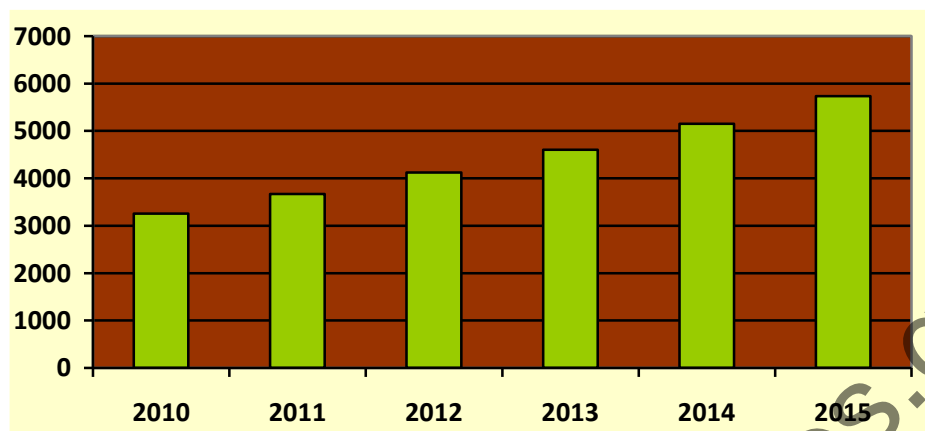
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 124,23	2 361,54	2 658,82	3 013,10	3 438,10	3 855,07
2. Konsumsi LNPRT	66,96	72,68	78,15	85,20	96,20	103,92
3. Konsumsi Pemerintah	486,59	532,20	588,16	652,21	756,60	875,95
4. PMTB	1 478,01	1 609,77	1 813,38	2 027,30	2 240,96	2 481,56
5. Perubahan Inventori	62,20	96,53	127,95	150,87	179,04	197,03
6. Ekspor	1 613,08	1 773,90	1 935,32	2 134,61	2 347,38	2 640,01
7. Impor	2 573,49	2 777,57	3 076,68	3 456,01	3 903,87	4 417,66
P D R B (1+2+3+4+5+6-7)	3 257,58	3 669,05	4 125,10	4 601,41	5 154,38	5 735,89

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Nilai PDRB Kabupaten Bengkulu Utara (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada tahun 2015, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara (adh Berlaku) tercatat sebesar 5.735,89 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2010 hanya sebesar 3.257,58 milyar rupiah atau telah meningkat 76,10 persen dibanding PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2010.

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 124,23	2 235,97	2 363,20	2 498,56	2 642,67	2 790,61
2. Konsumsi LNPRT	66,96	70,53	72,80	76,59	83,30	86,96
3. Konsumsi Pemerintah	486,59	507,67	535,78	562,99	611,51	665,78
4. PMTB	1 478,01	1 558,61	1 685,73	1 821,47	1 943,45	2 047,52
5. Perubahan Inventori	62,20	86,14	90,74	95,07	110,42	116,73
6. Ekspor	1 613,08	1 725,51	1 879,47	2 003,52	2 159,61	2 367,10
7. Impor	2 573,49	2 728,02	2 950,45	3 178,32	3 448,84	3 778,36
P D R B (1+2+3+4+5+6-7)	3 257,58	3 456,41	3 677,27	3 879,89	4 102,11	4 296,76

* Angka sementara

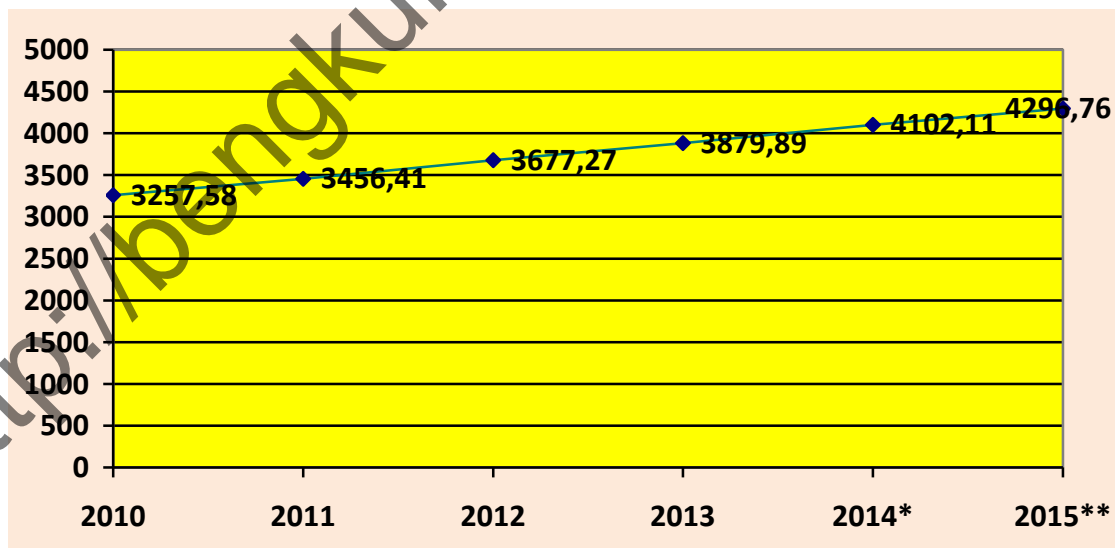
** Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau produk dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan

atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2015, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara (adh Konstan) mencapai 4.296,76 milyar rupiah atau telah mengalami kenaikan 31,90 persen dibanding PDRB tahun 2010.

Dari Gambar 3.2, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Sebaliknya, pada PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga justru telah ditiadakan. Perbedaan ini dimaksudkan untuk keperluan variasi analisis PDRB. PDRB adh Berlaku digunakan untuk menganalisis struktur komponen penyusun PDRB dan dapat diperbandingkan perubahan/pergeseran strukturnya setiap tahun. Sedangkan PDRB adh Konstan lebih digunakan untuk menganalisis pertumbuhan PDRB beserta komponen-komponen penyusunnya karena untuk melihat pertumbuhan PDRB, pengaruh harga harus dihilangkan, hanya melihat perubahan kuantitasnya.

Gambar 3.2. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah)



* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor netto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 3.257,58 milyar rupiah baik PDRB adh Berlaku maupun adh Konstan. Kemudian tahun 2011 PDRB Kabupaten Bengkulu Utara adh Berlaku mencapai 3.669,05 milyar rupiah sedangkan PDRB adh Konstan sebesar 3.456,41 milyar rupiah, hal ini menunjukkan terjadi perubahan sebesar 6,15 persen antara PDRB adh Berlaku dan PDRB adh Konstan. Pada tahun-tahun berikutnya perbandingan antara PDRB adh Berlaku dan adh Konstan terus mengalami kenaikan sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.2 dan tabel indeks implisit (Tabel 3.5).

Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010—2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,21	64,36	64,45	65,40	66,70	67,21
2. Konsumsi LNPRT	2,06	1,98	1,89	1,85	1,87	1,81
3. Konsumsi Pemerintah	14,94	14,51	14,26	14,16	14,68	15,27
4. PMTB	45,37	43,87	43,96	44,00	43,48	43,26
5. Perubahan Inventori	1,91	2,63	3,10	3,27	3,47	3,44
6. Ekspor	49,52	48,35	46,92	46,33	45,54	46,03
7. Impor	79,00	75,70	74,58	75,01	75,74	77,02
P D R B (1+2+3+4+5+6-7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2015, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar masih

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Impor juga mempunyai peran relatif besar, yakni sekitar 74 sampai dengan 79 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Demikian halnya ekspor juga mempunyai peran yang cukup besar, karena sekitar 45 sampai dengan 49 persen produk Kabupaten Bengkulu Utara telah dipasarkan di luar wilayah domestik Kabupaten Bengkulu Utara. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) mempunyai peran sebesar 43 sampai dengan 45 persen. Adapun kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada di atas 14 persen.

Jika dilihat dari neraca perdagangan regional Kabupaten Bengkulu Utara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor pada tahun 2010-2015, terlihat bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi daripada nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan regional tersebut menunjukkan posisi “defisit”.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011—2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,26	5,69	5,73	5,77	5,60
2. Konsumsi LNPRT	5,33	3,22	5,20	8,76	4,40
3. Konsumsi Pemerintah	4,33	5,54	5,08	8,62	8,87
4. PMTB	5,45	8,16	8,05	6,70	5,35
5. Perubahan Inventori	38,50	5,33	4,78	16,14	5,71
6. Ekspor	6,97	8,92	6,60	7,79	9,63
7. Impor	6,00	8,15	7,72	8,51	9,55
PDRB	6,10	6,39	5,51	5,73	4,75

* Angka sementara

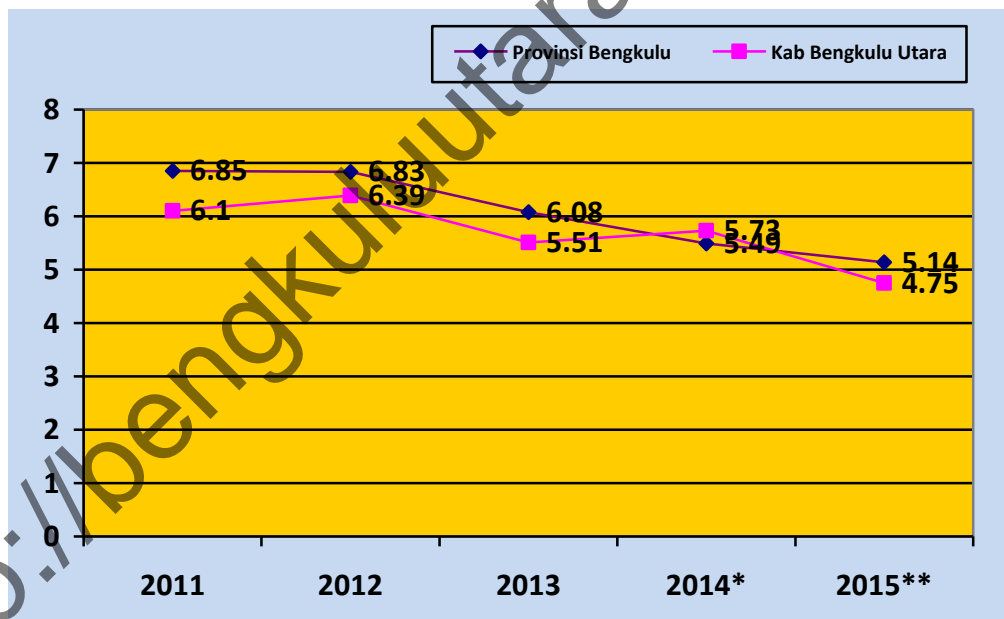
** Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang

menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2011 sampai dengan 2015 secara rata-rata mencapai 5.8 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,10 persen pada tahun 2011; 6,39 persen pada tahun 2012; 5,51 persen pada tahun 2013; 5,73 persen pada tahun 2014 dan 4,75 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 6,39 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 (4,75 persen). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus tumbuh positif, namun mempunyai trend yang melambat setiap tahun.

Pola perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada Provinsi Bengkulu dimana pada tahun 2011, PDRB Provinsi Bengkulu mampu tumbuh mencapai 6,85 persen. Namun, pada tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 5,14 persen. Begitu pula dengan pola pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir Kabupaten Bengkulu Utara mengalami perlambatan ekonomi.

Gambar 3.3. Perbandingan Pertumbuhan PDRB adh Konstan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2015 (Persen)



Sementara itu, indeks implisit⁶ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan

⁶⁶ Indeks perkembangan (perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan)

pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan pelaku ekonomi luar domestik) juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	105,62	112,51	120,60	130,10	138,14
2. Konsumsi LNPRT	100,00	103,05	107,35	111,22	115,49	119,50
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	104,83	109,78	115,38	123,73	131,57
4. PMTB	100,00	103,28	107,57	111,30	115,31	121,20
5. Perubahan Inventori	100,00	112,06	141,02	158,69	162,14	168,80
6. Ekspor	100,00	102,80	102,97	106,54	108,69	111,51
7. Impor	100,00	101,82	104,28	108,74	113,19	116,92
P D R B	100,00	106,15	112,18	118,75	125,65	133,49

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan akhir konsumsi rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Berikut periode masing-masing komponen PDRB pengeluaran di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2010-2015.

3.2.1. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Berdasarkan Tabel 3.6 terlihat bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2015 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berkisar antara 64 hingga 67 persen. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 67,21 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 64,36 persen.

Peningkatan pendapatan dan daya beli telah mendorong rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya, baik konsumsi barang maupun jasa. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Berdasarkan adh Berlaku, pada tahun 2011, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 45,9 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non-makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 51,1 juta rupiah pada tahun 2012; 56,8 juta rupiah pada tahun 2013; dan menjadi 63,3 juta rupiah pada tahun 2014 dan menjadi 70,24 juta rupiah pada tahun 2015.

Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Konsumsi Rumah Tangga :						
a. ADHB (Milyar Rp)	2 124,23	2 361,54	2 658,82	3 013,30	3 438,07	3 855,10
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	2 124,23	2 235,97	2 363,20	2 498,56	2 642,67	2 790,61
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,21	64,36	64,45	65,40	66,70	67,21
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga/tahun :						
a. ADHB (Ribuan Rp)	31 745,20	34 381,18	37 887,88	42 060,97	46 995,12	51 659,94
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	31 745,20	32 553,03	33 675,33	34 876,11	36 122,71	37 395,65
Rata-rata Konsumsi per Kapita/tahun :						
a. ADHB (Ribuan Rp)	8 243,83	8 928,89	9 839,61	10 923,33	12 204,76	13 836,12
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	8 243,83	8 454,12	8 745,60	9 057,41	9 381,20	9 702,13
Pertumbuhan (%):						
a. Total konsumsi Rumah Tangga	-	5,26	5,69	5,73	5,77	5,60
b. Per-Rumah Tangga	-	2,54	3,45	3,57	3,57	3,52
c. Perkapita	-	2,55	3,45	3,57	3,57	3,42
Jumlah Rumah Tangga (unit)	66 915	68 687	70 176	71 641	73 158	74,624
Jumlah Penduduk (jiwa)	257 675	264 483	270 216	275 858	281 699	287,624

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara riil berkisar antara 2,55 sampai dengan 3,57 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yang hanya tumbuh 2,55 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 3,57 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,26 persen pada tahun 2011. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga tahun 2014 yaitu mencapai 5,77 persen (tahun 2014) dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 5,60 persen.

Tabel 3.7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010—2015 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	53,09	52,01	51,75	51,55	51,68	51,58
1.b. Pakaian dan alas kaki	5,51	5,94	5,85	6,05	6,25	6,41
1.c. Perumahan, perkakas, perlengk. dan penyelenggaraan RT	10,14	10,56	10,76	11,04	11,19	11,22
1.d. Kesehatan dan pendidikan	7,31	7,54	7,52	7,42	7,34	7,40
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	17,32	17,38	17,55	17,50	17,20	17,09
1.f. Hotel dan restoran	4,49	4,48	4,46	4,32	4,17	4,10
1.g. Lainnya	2,15	2,09	2,11	2,12	2,17	2,20
Total Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2015, terlihat pada struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Utara bahwa konsumsi makanan sedikit lebih tinggi dibandingkan konsumsi non-makanan yaitu sebesar 53,09 persen. Namun demikian proporsi pengeluaran makanan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2013-2015 bahwa proporsi pengeluaran makanan cenderung turun mendekati 51 persen. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun adalah 53,09 persen (2010); 52,01 persen (2011) ; 51,75 persen (2012) ; 51,55 persen (2013) ; 51,68 persen (2014); dan 51,58 persen (2015).

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik-menarik antara kebutuhan rumah tangga makanan dan non-makanan masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin besar seiring dengan semakin pentingnya peranan konsumsi non-makanan sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Akibatnya, proporsi pengeluaran untuk non-makanan menjadi semakin besar dan proporsi pengeluaran makanan semakin kecil. Pengeluaran non-makanan tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi,

jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2011 – 2015 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	5,30	5,79	5,11	4,89	5,08
1.b. Pakaian dan alas kaki	6,30	6,47	7,36	7,83	5,98
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan RT	5,26	5,57	6,23	6,52	6,31
1.d. Kesehatan dan pendidikan	5,10	5,72	6,25	6,87	6,37
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	5,11	5,63	6,62	7,02	6,25
1.f. Hotel dan restoran	3,60	3,44	3,77	4,19	4,92
1.g. Lainnya	6,74	6,90	9,40	7,31	7,00
Konsumsi Rumah Tangga	5,26	5,69	5,73	5,77	5,60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3.8 memperlihatkan fluktuasi pertumbuhan riil dari setiap kelompok konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Utara. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini juga menunjukkan terjadinya pertumbuhan yang lebih tinggi pada kelompok konsumsi non-makanan, sehingga bisa mengindikasikan peningkatan kemakmuran meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan konsumsi kelompok makanan (1.a) lebih lambat daripada pertumbuhan konsumsi kelompok non-makanan (1.b s.d 1.g). Konsumsi untuk kelompok makanan hanya tumbuh antara 4,56 persen sampai dengan 5,96 persen selama tahun 2011-2015. Sedangkan konsumsi kelompok non-makanan bisa lebih tinggi. Pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas kaki tumbuh cukup tinggi, yaitu berkisar antara 6 hingga 7 persen. Begitu pula untuk pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya serta untuk keperluan konsumsi lainnya..

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 - 2015⁷ (Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(3)	(4)	(5)		
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	3,43	5,91	7,41	9,05	6,50
1.b. Pakaian dan alas kaki	12,85	4,03	9,27	9,37	8,42
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan RT	9,92	8,74	9,45	8,50	5,83
1.d. Kesehatan dan pendidikan	9,17	6,17	5,25	5,61	6,26
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	6,10	7,67	5,94	4,83	4,81
1.f. Hotel dan restoran	7,18	8,27	5,72	5,74	5,21
1.g. Lainnya	1,56	5,96	4,53	8,63	6,36
Konsumsi Rumah Tangga	5,62	6,53	7,19	7,88	6,18

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi makanan dan non-makanan. Peningkatan harga ini berfluktuasi untuk masing-masing kelompok konsumsi. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga selalu mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di atas 7 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) peranannya secara ekonomi dalam PDRB menurut pengeluaran relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Akan tetapi manfaat sosialnya cukup besar, karena LNPRT ikut membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah ketahanan rumah tangga dan lainnya. Oleh karenanya perkembangan LNPRT sering menjadi sorotan tingkat

⁷ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

kemajuan kepedulian sosial atau modernisasi suatu komunitas masyarakat. Data berikut menunjukkan peran LNPRT terhadap PDRB menurut pengeluaran antar periode waktu 2010 – 2015.

Tabel 3.10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010—2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Pengeluaran konsumsi LNPRT						
a. ADHB (Milyar Rp)	66,96	72,68	78,15	85,19	96,20	103,92
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	66,96	70,53	72,80	76,60	83,30	86,97
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,06	1,98	1,89	1,85	1,87	1,81
Pertumbuhan (%)	-	5,33	3,22	5,20	8,76	4,40

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kontribusi konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB menurut pengeluaran selama periode 2010-2015 relatif kecil yaitu berkisar antara 1,81 persen sampai dengan 2,06 persen. Besarnya konsumsi akhir LNPRT tahun 2015 sebesar 103,92 milyar rupiah atau 1,81 persen dari total PDRB menunjukkan mulai adanya peningkatan peran LNPRT dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Utara. Konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2015 tumbuh tidak terlalu tinggi yaitu 4,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Konsumsi Pemerintah:						
a. ADHB (Milyar Rp)	486,59	532,20	588,15	652,21	756,60	875,95
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	486,59	507,66	535,78	562,99	611,51	665,78
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	14,94	14,51	14,26	14,16	14,68	15,27
Konsumsi Pemerintah per-Kapita:						
a. ADHB (Ribu Rp)	1 888,39	2 012,23	2 176,61	2 364,28	2 685,85	3 047,43
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	1 888,39	1 919,46	1 982,78	2 040,89	2 170,79	2 316,25
Pertumbuhan:						
a. Total konsumsi pemerintah (%)	-	4,33	5,54	5,08	8,62	8,87
b. Konsumsi per-kapita (%)	-	1,65	3,30	2,93	6,36	6,70
Jumlah penduduk (jiwa)	257,675	264,483	270,216	275,858	281,699	287,439

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 486,59 milyar rupiah, kemudian meningkat hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 875,95 milyar rupiah. Selanjutnya jika ditinjau dari konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, ternyata juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB selama tahun 2010 – 2015 berkisar antara 14,16 persen sampai dengan 15,27 persen, tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tiap tahunnya. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2013, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 15,27 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan

bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 1.88 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (Tabel 3.11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 1,65 persen pada tahun 2010, dan meningkat terus menjadi 6,28 persen pada tahun 2015.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per-kapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 8,87 persen dan untuk konsumsi per-kapita sebesar 6,70 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, PMTB selalu mengalami pertumbuhan positif, namun kecepatan pertumbuhannya berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2011, pertumbuhan PMTB sebesar 5,45 persen, pada tahun 2012

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

pertumbuhannya semakin cepat menjadi 8,16 persen. Namun, pada tahun 2013, kecepatan pertumbuhannya melambat menjadi 6,32 persen dan pada tahun 2015 tumbuh 5,66 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen non bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan pada sub komponen non-bangunan relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen bangunan. Dalam periode tahun 2011 s.d 2015 pertumbuhan non-bangunan berkisar antara 4,72 persen sampai dengan 7,45 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 7,45 persen sedangkan pada tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 4,72 persen.

Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total PMTB:						
a. ADHB (Milyar Rp)	1 478,00	1 609,76	1 813,38	2 027,27	2 240,96	2 481,56
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	1 478,00	1 558,61	1 685,73	1 821,47	1 943,45	2 047,52
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	45,37	43,87	43,96	44,00	43,48	43,26
Struktur PMTB:						
a. Bangunan (Milyar Rp)	298,41	330,83	375,76	420,31	478,34	535,56
(Persen)	9,16	9,02	9,11	9,12	9,28	9,34
b. Non-Bangunan (Milyar Rp)	1 179,59	1 278,93	1 437,61	383,,15	414,48	445,95
(Persen)	36,21	34,86	34,85	34,88	34,20	33,93
Pertumbuhan:						
a. Bangunan (%)	-	7,01	10,89	8,20	8,18	7,59
b. Non-Bangunan (%)	-	5,06	7,45	8,01	6,30	4,75
c. Total PMTB (%)	-	5,45	8,16	8,05	6,70	5,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Proporsi bangunan terhadap total PMTB relatif stabil selama periode 2010 s.d 2015 (Tabel 13.12). Sementara itu jika dilihat dari pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang cukup variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2010 s.d 2015,

pertumbuhan sub komponen bangunan berkisar antara 7,01 s.d 10,89 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 10,89 persen, tetapi pada tahun berikutnya melambat hanya tumbuh 8,20 persen dan tahun 2015 sedikit menurun yaitu tumbuh sebesar 7,59 persen.

Secara umum, peranan PMTB dalam pembentukan PDRB selama tahun 2010 sampai dengan 2015 cukup stabil berkisar antara 43,26 persen sampai dengan 45,37 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Nilai Inventori:						
a. ADHB (Milyar Rp)	62,19	96,53	127,95	150,87	179,04	197,03
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	62,19	86,14	90,73	95,07	110,42	116,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,91	2,63	3,10	3,27	3,47	3,44

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Selama periode tahun 2010 s.d 2015, perubahan inventori Kabupaten Bengkulu Utara bernilai positif dengan rata-rata proporsi selama periode tersebut sebesar 3.44 persen. Angka perubahan inventori dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dimana tahun 2015 berada pada posisi 197,03 milyar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsepnya, PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik. Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Jadi, transaksi impor dapat menjelaskan bahwa ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen, baik berupa barang maupun jasa.

Secara total, nilai ekspor Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2010 s.d 2015 terus meningkat (tabel 3.14). Pada tahun 2010, nilai ekspor Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 1,61 triliun rupiah dan meningkat rata-rata 9.27 setiap tahunnya hingga mencapai 2.35 triliun rupiah pada tahun 2015. Selama kurun waktu 2010 - 2015, proporsi nilai ekspor dalam PDRB cenderung menurun, yaitu dari 49.52 persen pada tahun 2010 menjadi 45,51 persen pada tahun 2015.

Nilai impor Kabupaten Bengkulu Utara juga meningkat rata-rata 8,39 persen dari tahun 2010-2015, yaitu dari 2,57 triliun menjadi 2,35 triliun. Sedangkan untuk proporsi impor dalam PDRB menurun dari tahun 2010 hingga tahun 2012, yaitu dari 79,00 persen menjadi 74,58 persen dan kemudian kembali naik pada tahun 2013 hingga tahun 2015 menjadi 75,29 persen.

Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Nilai Ekspor :						
a. ADHB (Milyar Rp)	1 613,08	1 773,90	1 935,82	2 134,61	2 347,38	2 640,01
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	1 613,08	1 725,51	1 879,47	2 003,52	2 159,61	2 367,51
Total Nilai Impor :						
a. ADHB (Milyar Rp)	2 573,48	2 777,57	3 076,68	3 456,01	3 903,87	4 417,66
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	2 573,49	2 728,02	2 950,45	3 178,32	3 448,84	3 778,36
Net Ekspor :						
a. ADHB (Milyar Rp)	(960,41)	(1 003,67)	(1 141,85)	(1 321,40)	(1 556,49)	(1 777,65)
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	(960,41)	(1 002,97)	(1 070,97)	(1 174,80)	(1 289,23)	(1 410,85)
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) :						
a. Ekspor (Persen)	49,52	48,35	46,92	46,33	45,54	46,03
b. Impor (Persen)	79,00	75,70	74,58	75,01	75,74	77,02
Pertumbuhan :						
a. Ekspor (Persen)	-	6,97	8,92	6,60	7,79	9,63
b. Impor (Persen)	-	6,00	8,15	7,72	8,51	9,55

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan domestik terhadap produk luar domestik. Komponen impor disini termasuk juga pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Bengkulu Utara di luar wilayah Bengkulu Utara, baik yang berupa makanan maupun non-makanan (termasuk jasa).

Dilihat dari neraca perdagangan, Kabupaten Bengkulu Utara mengalami defisit. Nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor sehingga net ekspor bernilai minus. Net ekspor

antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah hasilnya juga dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk penghitungan ekspor, impor, dan net ekspor dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 3.14 menunjukkan net ekspor bertanda negatif yang berarti bahwa ekspor antar daerah jauh lebih rendah dibandingkan impor antar daerah. Rendahnya ekspor antar daerah seiring dengan masih terbatasnya produksi yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha (industri), sedangkan kebutuhan domestik semakin banyak dan beragam.

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BENGKULU UTARA MENURUT PENGELUARAN 2010-2015



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Nilai PDRB :						
a. ADHB (Milyar Rp)	3 257,58	3 669,05	4 125,10	4 607,41	5 154,38	5 735,89
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	3 257,58	3 456,41	3 677,27	3 879,89	4 102,11	4 296,76
PDRB Perkapita :						
a. ADHB (Ribu Rp)	12 642,21	13 872,55	15 265,93	16 702,12	18 297,47	19 955,15
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	12 642,21	13 068,55	13 608,64	14 064,65	14 562,03	14 948,42
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (%)	-	3,37	4,13	3,35	3,54	2,65
Jumlah Penduduk (jiwa)	257,675	264,483	270,216	275,858	281,699	287,439
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	2,76	2,17	2,09	2,12	2,04

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan

data PDRB perkapita. PDRB perkapita Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 4.1), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan PDRB perkapita secara riil juga selalu meningkat di kisaran 3,41 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2,24 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Konsumsi Akhir ADHB (Milyar Rp)	2 677,78	2 966,42	3 325,13	3 750,69	4 290,87	4 834,94
a. Rumah Tangga	2 124,23	2 361,54	2 658,82	3 013,29	3 438,07	3 855,07
b. LNPRT	66,96	72,68	78,15	85,19	96,20	103,92
c. Pemerintah	486,59	532,20	588,16	652,21	756,60	875,95
PDRB ADHB (Milyar Rp)	3 257,58	3 669,05	4 125,10	4 607,41	5 154,38	5 735,89
Proporsi Total Konsumsi Akhir terhadap PDRB (%)	82,20	80,85	80,61	81,41	83,25	84,29

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Bengkulu Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tidak digunakan sebagai konsumsi akhir atau dengan kata lain yang digunakan sebagai PMTB maupun inventori, memiliki peran yang relatif kecil.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas terlihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Milyar Rp)	2 124,23	2 361,54	2 658,82	3 013,29	3 438,07	3 855,07
Total PMTB ADHB (Milyar Rp)	1 478,01	1 609,77	1 813,38	2 027,27	2 240,96	2 481,56
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,44	1,47	1,47	1,49	1,53	1,55

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pola rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB relatif mirip dibandingkan dengan rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama periode 2010 sampai dengan 2015 cenderung stabil yaitu berkisar antar 1,44 persen samapai dengan 1,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya dorongan pelaku ekonomi dalam meningkatkan nilai investasi pada tiap tahunnya dibandingkan dengan peningkatan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara (sekitar 65 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.4. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Milyar Rp)	2 124,23	2 361,54	2 658,82	3 013,29	3 438,07	3 855,07
Total Ekspor ADHB (Milyar Rp)	1 613,08	1 773,90	1 935,32	2 134,61	2 347,38	2 640,01
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,32	1,33	1,37	1,41	1,46	1,46

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Utara lebih dari 1,32 kali dari produk yang diekspor ke luar Bengkulu Utara. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor ini relatif stabil selama tahun 2010-2015, berada pada kisaran 1,32 sampai dengan 1,46.

4.5 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.5. Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
PDRB ADHB (Milyar Rp)	3 257,58	3 669,05	4 125,10	4 607,41	5 154,38	5 735,89
Impor ADHB (Milyar Rp)	2 573,49	2 777,57	3 076,68	3 456,01	3 903,87	4 417,66
Rasio PDRB terhadap Impor	1,27	1,32	1,34	1,33	1,32	1,30

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 - 2015 relatif stabil yaitu berkisar antara 1,27 sampai dengan 1,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara memiliki ketergantungan terhadap komoditas impor yang relatif tinggi. Rasio terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,27 sedangkan rasio tertinggi pada tahun 2012 sebesar 1,34.

4.6 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Neraca perdagangan dapat menggambarkan transaksi ekspor dan impor antar wilayah. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto". Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya

kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.6. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 - 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Ekspor ADHB (Milyar Rp)	1 613,08	1 773,90	1 935,32	2 134,61	2 347,38	2 640,01
Impor ADHB (Milyar Rp)	2 573,49	2 777,57	3 076,68	3 456,01	3 903,87	4 417,66
Net Ekspor ADHB (Milyar Rp)	(960,41)	(1 003,67)	(1 141,36)	(1 321,40)	(1 556,49)	(1 777,65)
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,63	0,64	0,63	0,62	0,60	0,60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama periode 2010 - 2015, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Kabupaten Bengkulu Utara dengan antar kabupaten, antar provinsi, maupun dengan luar negeri selalu menunjukkan nilai negatif (Tabel 4.6). Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bengkulu Utara selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih rendah dari impor menyebabkan adanya aliran uang keluar. Defisit perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2015 tercatat masing-masing sebesar minus 960,41 milyar rupiah (2010), minus 1.003,67

milyar rupiah (2011), minus 1.141,36 milyar rupiah (2012), minus 1.321,40 milyar rupiah (2013), minus 1.556,49 milyar rupiah (2014) dan minus 1.777,65 milyar rupiah (2015).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2010-2015 yaitu berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,64. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,63 menjadi sekitar 0,64 pada tahun 2011 dan 2012, kemudian 0,62 pada tahun 2013 dan 0,60 pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor Kabupaten Bengkulu Utara selalu lebih rendah daripada nilai impor.

4.7 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RASIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. *ICOR* juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka *ICOR* mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formulasinya adalah sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Data pada Tabel 4.7 menunjukkan besaran *ICOR* meningkat dari 7,84 pada tahun 2011 menjadi 10,52 pada tahun 2015. *ICOR* sebesar 10,52 pada tahun 2015 berarti bahwa di Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan tambahan 1 unit output diperlukan 10,52 unit capital.

Tabel 4.7. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
PDRB ADHK 2010 (Milyar Rp)	3 257,58	3 456,41	3 677,27	3 879,89	4 102,11	4 296,76
Perubahan (Milyar Rp)	-	198,83	220,86	202,62	222,22	194,65
PMTB ADHK 2010 (Milyar Rp)	1 478,00	1 558,61	1 685,73	1 821,47	1 943,45	2 047,52
ICOR	-	7,84	7,63	8,99	8,75	10,52

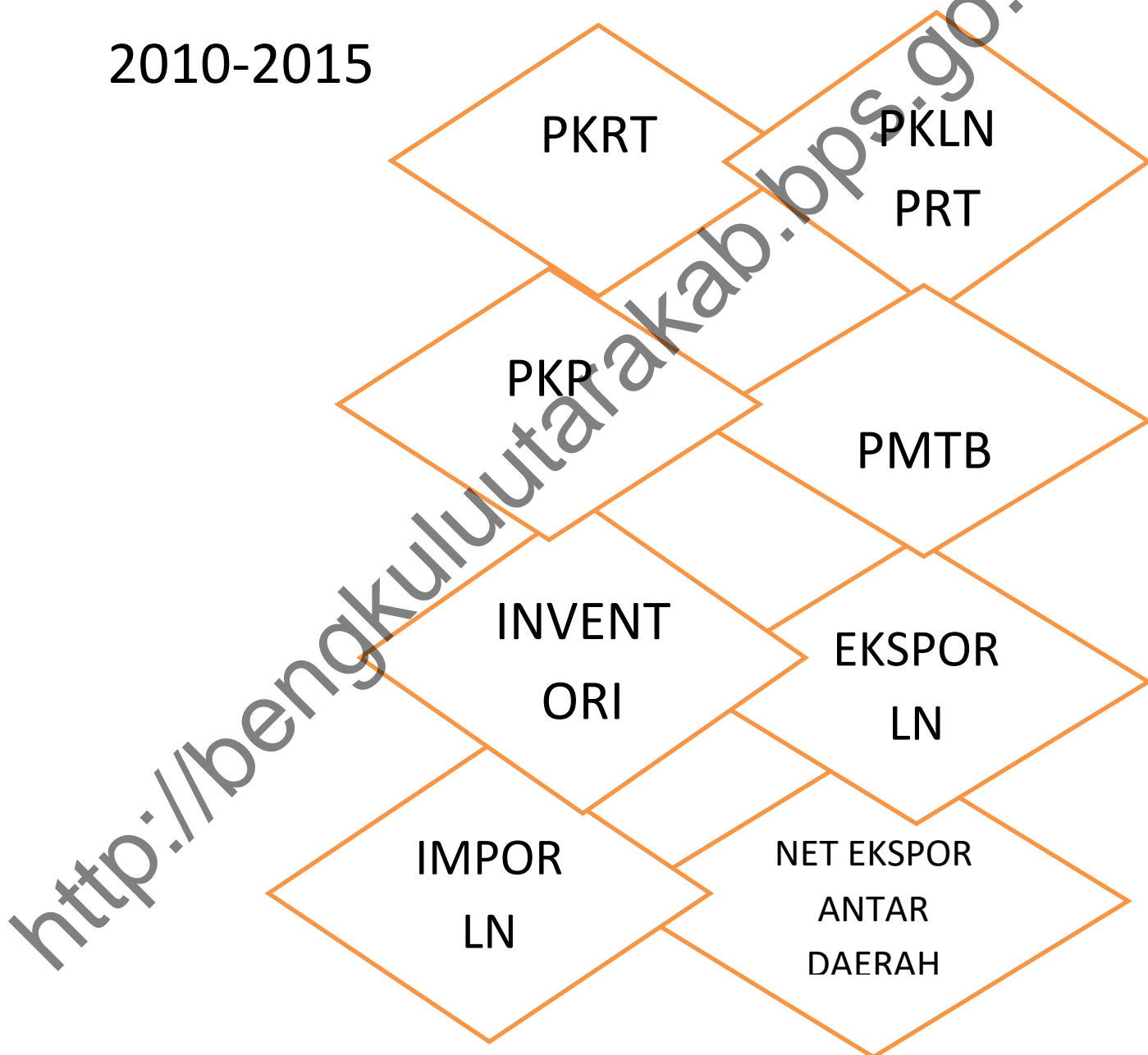
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d 2015 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2015, sehingga lebih mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Sebagian data tentang interaksi dengan luar domestik (*external account*) secara agregat disajikan dalam publikasi ini, seperti ekspor, impor, dan transfer berjalan neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara terhadap ekonomi daerah lain.

LAMPIRAN TABEL

PDRB KABUPATEN BENGKULU UTARA MENURUT PENGELUARAN 2010-2015



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2 124,23	2 361,54	2 658,82	3 013,29	3 438,07	3 855,07
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	1 127,66	1 228,12	1 375,99	1 553,36	1 776,78	1 988,34
1.b. Pakaian dan alas kaki	116,99	140,34	155,45	182,35	215,04	247,09
1.c. Perumahan, perkakas, perlengk. dan penyel. rumah tangga	215,48	249,33	286,21	332,78	384,61	432,70
1.d. Kesehatan dan pendidikan	155,19	178,07	199,88	223,53	252,29	285,17
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya						
1.f. Hotel dan restoran	95,35	105,41	118,57	130,08	143,30	158,18
1.g. Lainnya	45,58	49,41	55,97	64,00	74,60	84,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	66,96	72,68	78,15	85,19	96,20	103,92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	486,59	532,19	588,16	652,21	756,60	875,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1 478,01	1 609,77	1 813,38	2 027,27	2 240,96	2 481,56
4.a. Bangunan	298,42	330,83	375,76	420,31	478,34	535,56
4.b. Non-Bangunan	1 179,59	1 278,93	1 437,61	1 606,96	1 762,62	1 945,99
5. Perubahan Inventori	62,20	96,53	127,95	150,87	179,04	197,03
6. Ekspor	1 613,08	1 773,90	1 935,32	2 134,61	2 347,38	2 640,01
7. Impor	2 573,49	2 777,57	3 076,68	3 456,01	3 903,87	4 417,66
P D R B (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	3 257,58	3 669,05	4 125,10	4 607,41	5 154,38	5 735,89

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2 124,23	2 235,97	2 363,20	2 498,56	2 642,67	2 790,61
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	1 127,66	1 187,44	1 256,13	1 320,28	1 384,88	1 455,25
1.b. Pakaian dan alas kaki	116,99	124,37	132,41	142,15	153,28	162,45
1.c. Perumahan, perkakas, perlengk. dan penyel. rumah tangga	215,48	226,83	239,45	254,36	270,96	288,05
1.d. Kesehatan dan pendidikan	155,19	163,11	172,45	183,23	195,82	208,05
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	367,98	386,79	408,56	435,60	466,20	495,34
1.f. Hotel dan restoran	95,35	98,78	102,18	106,03	110,47	115,91
1.g. Lainnya	45,58	48,65	52,01	56,89	61,06	65,33
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	66,59	70,53	72,80	76,59	83,30	86,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	486,59	507,67	535,78	562,99	611,51	665,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1 478,01	1 558,67	1 685,73	1 821,47	1 943,45	2 047,52
4.a. Bangunan	298,42	319,34	354,11	383,15	414,48	445,95
4.b. Non-Bangunan	1 179,59	1 239,28	1 331,62	1 438,32	1 528,97	1 601,57
5. Perubahan Inventori	62,20	86,14	90,74	95,07	110,42	116,73
6. Ekspor	1 613,08	1 725,51	1 879,47	2 003,52	2 159,61	2 367,51
7. Impor	2 573,48	2 728,02	2 950,45	3 178,32	3 448,84	3 778,36
P D R B (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	3 257,49	3 456,41	3 677,27	3 879,89	4 102,11	4 296,76

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,21	64,36	64,45	65,40	66,70	67,21
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	34,62	33,47	33,36	33,71	34,47	34,66
1.b. Pakaian dan alas kaki	3,59	3,83	3,77	3,96	4,17	4,31
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan.rumah tangga	6,61	6,80	6,94	7,22	7,46	7,54
1.d. Kesehatan dan pendidikan	4,76	4,85	4,85	4,85	4,89	4,97
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	11,30	11,19	11,31	11,44	11,47	11,48
1.f. Hotel dan restoran	2,93	2,89	2,87	2,82	2,78	2,76
1.g. Lainnya	1,40	1,35	1,36	1,39	1,45	1,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,06	1,98	1,89	1,85	1,87	1,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	14,94	14,51	14,26	14,16	14,68	15,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	43,37	43,87	43,96	44,00	43,48	43,26
4.a. Bangunan	9,16	9,02	9,11	9,12	9,28	9,34
4.b. Non-Bangunan	36,21	34,86	34,85	34,88	34,20	33,93
5. Perubahan Inventori	1,91	2,63	3,10	3,27	3,47	3,44
6. Ekspor	49,52	48,35	46,92	46,33	45,54	46,03
7. Impor	79,00	75,70	74,58	75,01	75,74	77,02
P D R B (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,21	64,69	64,27	64,39	64,42	64,95
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	34,62	34,35	34,16	34,03	33,76	33,87
1.b. Pakaian dan alas kaki	3,59	3,59	3,60	3,66	3,74	3,78
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	6,61	6,56	6,51	6,56	6,61	6,70
1.d. Kesehatan dan pendidikan	4,76	4,72	4,69	4,72	4,77	4,85
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	11,29	11,19	11,11	11,23	11,37	11,53
1.f. Hotel dan restoran	2,93	2,86	2,78	2,73	2,69	2,69
1.g. Lainnya	1,39	1,41	1,41	1,47	1,49	1,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,06	2,04	1,98	1,97	2,03	2,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	14,94	14,69	14,57	14,51	14,91	15,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	45,37	45,09	45,84	46,96	47,38	47,65
4.a. Bangunan	9,16	9,24	9,63	9,88	10,10	10,38
4.b. Non-Bangunan	36,21	35,85	36,21	37,07	37,27	37,27
5. Perubahan Inventori	1,91	2,49	2,47	2,45	2,69	2,72
6. Ekspor	49,52	49,62	51,11	51,64	52,65	55,10
7. Impor	79,00	78,93	80,23	81,92	84,07	87,94
P D R B (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	11,17	12,59	13,33	14,10	12,13
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	8,91	13,04	12,89	14,38	11,91
1.b. Pakaian dan alas kaki	19,96	10,76	17,30	17,93	14,90
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	15,71	14,79	16,27	15,57	12,51
1.d. Kesehatan dan pendidikan	14,74	12,25	11,83	12,87	13,03
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	11,53	13,73	12,95	12,19	11,36
1.f. Hotel dan restoran	11,04	11,99	9,70	10,16	10,39
1.g. Lainnya	8,40	13,27	14,95	16,56	13,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,55	7,52	9,00	12,93	8,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	9,37	10,51	10,89	16,01	15,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	8,91	12,65	11,79	10,54	10,74
4.a. Bangunan	10,86	13,58	11,85	13,81	11,96
4.b. Non-Bangunan	8,42	12,40	11,78	9,69	10,40
5. Perubahan Inventori	55,20	32,55	17,91	18,67	10,05
6. Ekspor	9,97	9,10	10,29	9,97	12,47
7. Impor	7,93	10,77	12,33	12,96	13,16
PDRB	12,63	12,43	11,69	11,87	11,28

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,26	5,69	5,73	5,57	5,60
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	5,30	5,79	5,11	4,89	5,08
1.b. Pakaian dan alas kaki	6,30	6,47	7,36	7,83	5,98
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	5,28	5,57	6,23	6,52	6,31
1.d. Kesehatan dan pendidikan	5,10	5,72	6,25	6,87	6,37
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	5,11	5,63	6,62	7,02	6,25
1.f. Hotel dan restoran	3,60	3,44	3,77	4,19	4,92
1.g. Lainnya	6,74	6,90	9,40	7,31	7,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,33	3,22	5,20	8,76	4,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,33	5,54	5,08	8,62	8,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,45	8,16	8,05	6,70	5,35
4.a. Bangunan	7,01	10,89	5,20	8,18	7,59
4.b. Non-Bangunan	5,06	7,45	8,01	6,30	4,75
5. Perubahan Inventori	38,50	5,33	4,78	16,14	5,71
6. Ekspor	6,97	8,92	6,60	7,79	9,63
7. Impor	6,00	8,15	7,72	8,51	9,55
PDRB	6,10	6,39	5,51	5,73	4,75

* Angka sementara

** Angkangsangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	111,17	125,17	141,85	161,85	181,48
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	100,00	108,91	122,02	137,75	157,56	176,33
1.b. Pakaian dan alas kaki	100,00	119,96	132,87	155,86	183,80	211,19
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	100,00	115,71	132,83	154,43	178,49	200,81
1.d. Kesehatan dan pendidikan	100,00	114,74	128,79	144,03	162,56	183,75
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	100,00	111,53	126,84	143,27	160,73	179,00
1.f. Hotel dan restoran	100,00	111,04	124,36	136,43	150,29	165,90
1.g. Lainnya	100,00	108,40	122,79	140,41	163,66	186,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	108,55	116,71	127,22	143,66	155,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	109,37	120,87	134,04	155,49	180,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	108,91	122,69	137,16	151,62	167,89
4.a. Bangunan	100,00	110,86	125,95	140,85	160,29	179,47
4.b. Non-Bangunan	100,00	108,42	121,87	136,23	149,43	164,97
5. Perubahan Inventori	100,00	155,20	205,72	242,56	287,85	316,79
6. Ekspor	100,00	109,97	119,98	132,33	145,52	163,66
7. Impor	100,00	107,93	119,55	134,20	151,70	171,66
PDRB	100,00	112,63	126,65	141,44	158,23	176,08

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	105,26	111,25	117,62	124,41	131,37
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	100,00	105,30	111,39	117,08	122,81	129,05
1.b. Pakaian dan alas kaki	100,00	106,30	113,18	121,50	131,02	138,86
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	100,00	105,26	111,12	118,04	125,74	133,68
1.d. Kesehatan dan pendidikan	100,00	105,10	111,12	118,07	126,18	134,21
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	100,00	105,11	107,16	118,38	126,69	134,61
1.f. Hotel dan restoran	100,00	103,60	114,11	111,20	115,86	121,56
1.g. Lainnya	100,00	106,74	108,72	124,83	133,95	143,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	105,33	108,72	114,38	124,40	129,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	104,33	110,12	115,70	125,67	136,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	105,43	114,05	123,24	131,49	138,53
4.a. Bangunan	100,00	107,01	118,66	128,39	138,89	149,44
4.b. Non-Bangunan	100,00	105,06	112,89	121,93	129,62	135,77
5. Perubahan Inventori	100,00	138,49	145,88	152,85	177,53	187,67
6. Ekspor	100,00	106,97	116,51	124,20	133,88	146,77
7. Impor	100,00	106,00	114,65	123,50	134,01	146,82
PDRB	100,00	106,10	112,88	119,10	125,93	131,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2015

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	105,62	112,51	120,60	130,10	138,14
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	100,00	103,43	109,54	117,65	128,30	136,63
1.b. Pakaian dan alas kaki	100,00	112,85	117,40	128,27	140,29	152,10
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	100,00	109,92	119,53	130,83	141,94	150,22
1.d. Kesehatan dan pendidikan	100,00	109,17	115,90	121,99	128,84	136,91
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	100,00	106,10	114,24	121,03	126,87	132,97
1.f. Hotel dan restoran	100,00	107,18	116,05	122,68	129,72	136,48
1.g. Lainnya	100,00	101,56	107,61	112,48	122,18	129,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	103,05	107,35	111,22	115,49	119,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	104,83	109,78	115,85	123,73	131,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	103,28	107,57	111,30	115,31	121,20
4.a. Bangunan	100,00	103,60	106,11	109,70	115,41	120,09
4.b. Non-Bangunan	100,00	103,20	107,96	111,72	115,28	121,51
5. Perubahan Inventori	100,00	112,06	141,02	158,69	162,14	168,80
6. Ekspor	100,00	102,80	102,97	106,54	108,69	111,51
7. Impor	100,00	101,82	104,28	108,74	113,19	116,92
PDRB	100,00	106,15	112,18	118,75	125,65	133,49

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pengeluaran, Tahun 2011-2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,62	6,53	7,19	7,88	6,18
1.a. Makanan, minuman, dan rokok	3,43	4,91	7,41	9,05	6,50
1.b. Pakaian dan alas kaki	12,85	4,03	9,27	9,37	8,42
1.c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	9,92	8,74	9,45	8,50	5,83
1.d. Kesehatan dan pendidikan	9,17	6,17	5,25	5,61	6,26
1.e. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	6,10	7,67	5,94	4,83	4,81
1.f. Hotel dan restoran	7,18	8,27	5,72	5,74	5,21
1.g. Lainnya	1,56	5,96	4,53	8,63	6,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,05	4,17	3,61	3,83	3,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,83	4,71	5,53	6,80	6,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3,28	4,15	3,46	3,60	5,11
4.a. Bangunan	3,60	2,43	3,38	5,21	4,06
4.b. Non-Bangunan	3,20	4,61	3,49	3,18	5,40
5. Perubahan Inventori	12,06	25,84	12,53	2,18	4,11
6. Ekspor	2,80	0,16	3,47	2,02	2,59
7. Impor	1,82	2,42	4,28	4,10	3,29
PDRB	6,15	5,68	5,86	5,81	6,24

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://bengkuluutarakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENGKULU UTARA**
Jl. Prof. M. Yamin, SH, 38611
Telp/ Fax: (0737) 521016
Homepage: <http://bengkuluutarakab.bps.go.id>
Email: bps1703@bps.go.id